

Djarot Setuju Harga Rokok Sebungkus Rp50 Ribu

"Terutama untuk rokok-rokok yang sudah banyak penggemarnya."

Rabu, 10 Agustus 2016 | 13:47 WIB

Oleh : **Bayu Adi Wicaksono, Filzah Adini Lubis**



Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. ([VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi](http://VIVA.co.id/Anhar-Rizki-Affandi))

VIVA.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung wacana pemerintah untuk menaikkan harga rokok menjadi sekitar Rp50 ribu per bungkus.

"Oh ya senang, ya bagus. Aku setuju itu, makin bagus, jadi untuk bisa menekan para perokok, ya naikkan saja (harganya), kasih pajak yang tinggi, terutama untuk rokok-rokok yang sudah banyak penggemarnya, enggak apa-apa," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2016.

Namun, Djarot juga berharap, pemerintah bisa mempertimbangkan segala dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan, jika wacana tersebut segera diterapkan.

Seperti berkurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, serta menyebabkan petani dan buruh tembakau kehilangan mata pencaharian. Sehingga tidak hanya berfokus pada penyempitan area bagi perokok saja.

"Di luar negeri itu kan mahal banget, kenapa mereka bisa jual mahal sekali seperti itu? Karena mereka tidak punya pabrik industri rokok di sana, tapi di Indonesia berbeda, makanya tolong ini dikaji betul secara seksama tentang persoalan-persoalan seperti ini," ujar Djarot.

Meskipun begitu, Djarot menegaskan, ia setuju terhadap rencana tersebut. "Setuju, salah satu penyumbang inflasi yang tinggi di Jakarta adalah rokok. Jadi tolong dikaji betul masalah ini," katanya.



Harga Rokok Naik Rp50 Ribu Potensi Picu Rokok Ilegal

"Yang mesti dibangun adalah kesadaran masyarakat, edukasi."

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 19:59 WIB

Oleh : **Toto Priyadi**



Produsen Rokok Ganti Kemasan (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVA.co.id – Wacana akan melambungnya harga rokok hingga Rp50 ribu perbungkus terus menjadi perdebatan hangat. Pro dan kontra mengenai wacana ini terus terjadi meski baru sebatas wacana.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memang tengah mengkaji usulan kenaikan harga rokok hingga dua kali lipat. Menariknya, wacana ini tampak sukses memisahkan dua kelompok yang pro dan kontra.

Wacana ini juga mendapat tanggapan dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Menurut Ketua AMTI, Budidoyo, pemerintah tidak boleh gegabah dengan wacana harga rokok bakal naik dua kali lipat.

"Motivasinya harus jelas, ingin menambah penerimaan negara atau karena benar mempertimbangkan prevalensi akibat rokok," kata Budidoyo saat dihubungi *VIVA.co.id*, Sabtu, 20 Agustus 2016.

Ditakutkan, menurut Budidoyo, rencana menaikkan harga rokok menjadi dua kali lipat ini justru akan memberikan dampak negatif seperti makin maraknya rokok-rokok ilegal yang beredar di masyarakat.

"Harga itu sangat tidak realistis. Ketika harga rokok menjadi tidak terjangkau tentu masyarakat akan mencari yang murah. Nah nanti tentu akan muncul rokok-rokok ilegal. Jika itu terjadi tentu tujuan pemerintah justru tidak akan tercapai," ujarnya menambahkan.

Masih menurut Budidoyo, efek lain jika benar-benar harga rokok naik dua kali lipat adalah justru akan menimbulkan PHK besar-besaran. "Harus dicermati, apakah dengan harga rokok naik terus kesejahteraan petani pasti terjamin?" katanya.

Budidoyo menambahkan, jika memang pertimbangan kesehatan menjadi dasar dari rencana untuk menaikkan harga rokok menjadi dua kali lipat, pemerintah harusnya lebih bertumpu pada peraturan yang telah ada.

"Yang mesti dibangun adalah kesadaran masyarakat, edukasi. *Toh*, ada peraturan pemerintah, manfaatkan lah itu. Jangan bikin aturan baru yang justru belum tentu efektif."

(mus)



Fadli Zon: Jangan Asal Naikkan Harga Rokok

'Saya bukan perokok, tetapi saya melihat dari sisi ekonomi.'

Senin, 22 Agustus 2016 | 17:21 WIB

Oleh : **Suryanta Bakti Susila, Lilis Khalisotussurur**



Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan).

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengingatkan pemerintah jangan asal menetapkan harga rokok, apalagi hingga sebesar Rp50 ribu. Bila harga rokok dinaikkan secara sepihak, akan berdampak besar pada sejumlah pihak, sehingga harus dipikirkan matang-matang.

Fadli menyebutkan dampak menaikkan cukai rokok akan berpengaruh mulai dari petani tembakau hingga penggunaannya. Sehingga akan berdampak tidak hanya pada industrinya.

Ia menambahkan cukai rokok masih cukup tinggi kontribusinya bagi APBN hingga mencapai Rp150 triliun. Sehingga ia mempertanyakan perekonomian negara yang masih dipasok cukai rokok.

"Menurut saya masih banyak rumah tangga Indonesia yang tergantung, misalnya petani-petani tembakau, para pelinting, harus dipikirkan. Saya bukan perokok, tetapi saya melihat dari sisi ekonomi," kata Fadli.

Menurutnya, jangan sampai pemerintah mengeluarkan konsep yang masih mentah. Sehingga sebelumnya, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam.



Harga Rokok Naik Pemerintah Serampangan, Latah & Tidak Bijak

Terkait rencana kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus.

Selasa, 23 Agustus 2016 | 13:38 WIB

Oleh : **Ridho Permana**



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, pemerintah disinyalir frustrasi karena "kebuntuan pendapatan", pemerintah terjebak pada kebijakan yang serampangan, latah, dan tidak bijak.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, publik disibukkan oleh gonjang-ganjing rencana kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus. Bermula dari hasil penelitian Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi viral di medsos, yang pada ujungnya disambut oleh pengambil kebijakan secara serampangan.

Atas masalah tersebut ia berpandangan bahwa kebijakan menaikkan harga rokok menjadi Rp50 ribu (naik lebih dari dua kali lipat) yang didasarkan pada satu hasil penelitian yang bisa dengan mudah dipelintir adalah sebuah proses pengambilan kebijakan yang tidak bijaksana.

"Lebih-lebih, kebijakan itu disusun atas dasar viral yang terkesan nyeleneh di Medsos. Mestinya, proses pengambilan suatu kebijakan itu harus memperhatikan banyak faktor, terutama sekali dampak sosial-ekonomi masyarakat," ujarnya di DPR, Selasa 23 Agustus 2016.

Menurutnya, proses pengambilan keputusan yang seperti itu bisa disebut serampangan, latah, dan tidak bijak. Ujungnya, kata Heri hanya mencuatkan kegaduhan baru, keributan baru. Malahan, akan lebih menjatuhkan kredibilitas eksekutif (Presiden) yang baru-baru ini bikin keputusan “blunder” terkait dwi kewarganegaraan Archandra.

"Kebijakan menaikkan harga rokok hingga Rp50 ribu itu bisa dicurigai sarat kepentingan. Kelihatannya itu sengaja dirancang secara sistematis. Dimulai dengan penelitian, yang sebetulnya masih harus didiskusikan lebih mendalam, tapi tiba-tiba secara longgar bisa mendrive keputusan pemerintah yang dampaknya sangat luas dan sistemik. Mulai dari rusaknya struktur industri rokok, petani tembakau hingga ancaman pengangguran yang berujung pada munculnya kelompok miskin baru," ujar politisi Gerindra ini.

Sebab itu, tambahnya, wacana kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus harus ditolak dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, banyak pabrik yang tutup, terutama rokok kretek yang sebetulnya sudah sangat tertekan oleh serbuan rokok luar. Hasilnya, pengangguran baru muncul, kelompok miskin baru juga pasti akan muncul. Untuk diketahui, tahun 2014 saja, industri rokok melibatkan 5,98 juta pekerja yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur + 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan. Sementara itu, jumlah pabrik rokok yang semula 4.669 telah berkurang menjadi 700 pada 2015 akibat kebijakan yang beberapa tahun belakangan.

Kedua, terganggunya struktur industri rokok sudah pasti akan berdampak pada penerimaan cukai dalam APBN. Tahun 2015 saja, tercatat penerimaan cukai sebesar Rp144,6 triliun (96,4 persen adalah sumbangan dari cukai rokok). Ini jauh lebih tinggi dari kontribusi deviden BUMN yang hanya mencapai Rp37 triliun.

Ketiga, tanpa dinaikkan saja, penerimaan cukai rokok sudah mulai menurun akibat berbagai kebijakan yang ada, termasuk peredaran rokok ilegal yang sudah mencapai 11,7 persen yang sudah merugikan negara sekitar Rp9 triliun. Akibatnya, penerimaan cukai di kuartal I-2016 turun 67 persen dari kuartal I-2015 atau menjadi hanya Rp7,9 triliun dari yang tadinya sebesar Rp24,1 triliun.

Keempat, kenaikan harga rokok tidak otomatis membuat perokok berhenti merokok. Yang paling mungkin terjadi adalah perokok-perokok itu akan beralih ke yang lain. Lebih-lebih kita tahu peredaran rokok ilegal naik drastis. Ini justru akan mencuatkan masalah baru.

Kelima, olehnya, pemerintah mesti mengkaji secara komprehensif kebijakan menaikkan harga rokok tersebut. Plus-minusnya harus dilihat secara hati-hati dan mendalam. Jika tujuannya untuk menaikkan penerimaan cukai yang pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp157,16 triliun (di mana cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp149,88), maka jangan sampai itu justru jadi boomerang. Alih-alih naik, justru makin nyungsep.

"Sekali lagi, pemerintah sudah harus menghentikan proses pembuatan kebijakan yang justru hanya menghadirkan kegaduhan baru. Rakyat sudah “mabok”. Pemerintah ditugasi untuk memberi kenyamanan, kedamaian, dan kepastian kepada masyarakat. Bukannya justru menambah kebingungan rakyat dengan urusan yang tidak perlu," tegasnya.

Eks Wakil Ketua Komisi VI ini menuturkan, rakyat sedang menunggu kerja nyata untuk menanggulangi kemiskinan yang sudah mencapai 28 juta orang. Rakyat sedang menunggu aksi nyata untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar.

"Rakyat juga sedang menunggu gebrakan nyata untuk meyakinkan bahwa pemerintah ini sungguh-sungguh dan mampu. Juga, jangan karena frustrasi terhadap "kebuntuan pendapatan" semua cara ditempuh secara serampangan, latah, dan tidak bijak. Akibatnya, gaduh yang terus-menerus," ujarnya. (webtorial)



Titiek Soeharto: Kampanye Antitembakau Didanai Asing

Kampanye antirokok dinilai akan mematikan industri rokok nasional.

Sabtu, 27 Agustus 2016 | 13:15 WIB

Oleh : **Mohammad Arief Hidayat, Daru Waskita (Yogyakarta)**



Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. (VIVAnews/Daru Waskita)

[Tweet](#)

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menengarai ada agenda terselubung dalam setiap kampanye antitembakau di Indonesia. Begitu juga dengan wacana menaikkan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus yang sempat mengemuka dalam dua pekan terakhir.

Pemerintah memang telah menyangkal wacana itu sebagai kabar bohong. Namun Titiek mencurigai isu itu diembuskan kelompok tertentu dengan maksud merusak industri rokok nasional, sehingga rokok produk asing dapat lebih leluasa masuk pasar Indonesia.

"Bukan rahasia umum, penelitian tentang tembakau, kampanye antitembakau, didanai oleh luar negeri yang punya maksud tertentu; berselimut," kata Titiek kepada wartawan di Yogyakarta pada Sabtu, 27 Agustus 2016.

Politikus Partai Golkar itu berargumentasi, jumlah perokok Indonesia sangat besar, dan rokok produk nasional lebih populer rokok kretek. Sementara sebagian besar rokok produk asing adalah rokok nonkretek.

"Kalau memang benar (harga rokok) dinaikkan, pasti (masyarakat) akan mencari rokok alternatif lain. Bisa rokok ilegal, bahkan membuat rokok lintingan, yang tidak terkena pajak cukai," kata Titiek, yang juga putri mending Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.

Jika wacana itu diterapkan, katanya, penjualan rokok kretek di Indonesia akan turun, rokok ilegal akan menjamur, dan pemerintah tidak akan mendapatkan tambahan pajak dari cukai rokok.

"Parahnya lagi petani tembakau akan gulung tikar, pabrik akan PHK (pemutusan hubungan kerja) buruhnya besar-besaran, dan pedagang asongan juga akan kolaps," ujarnya.

Dia berharap pemerintah berhati-hati jika ingin menaikkan cukai rokok demi menambahkan pendapatan pajak. Lagi pula, masih ada cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia.

"Menaikkan cukai rokok agar kesehatan masyarakat meningkat, saya sepakat, namun jangan sampai justru membunuh orang yang bukan perokok, seperti petani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pedagang asongan rokok," katanya.



Wagub DKI Dukung Harga Rokok Dinaikkan

Rabu, 10 August 2016 18:11 WIB Penulis: **Ilham Wibowo**



ANTARA/Yusran Uccang

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setuju dengan wacana menaikkan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus. Selain buruk bagi kesehatan, rokok juga merupakan penyumbang inflasi daerah DKI Jakarta.

"Setuju, karena salah satu penyumbang inflasi yang tinggi di DKI Jakarta adalah rokok. Betul loh itu, nomor dua," kata Djarot usai melepas kontingen Pramuka DKI Jakarta di Balai Pertemuan Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/8).

Djarot antusias wacana itu dapat terealisasi. Dengan harga sedemikian tinggi, perokok aktif niscaya akan mengurangi aktivitas meroko mereka.

"Senang, semakin bagus itu, untuk bisa menekan para perokok. Kasih pajak cukai yang tinggi, terutama terhadap rokok yang banyak penggemarnya," ujarnya.

Meski demikian, Djarot meminta agar wacana itu dikaji secara mendalam sebelum diterapkan. Dampak terhadap industri rokok tradisional dan para petani tembakau juga perlu dipikirkan.

"Kalau mau naik, naikan saja, tapi harus lihat dampaknya. Makanya tolong dihitung dampak negatif positifnya. Bukan hannya pembatasan area merokok, tetapi juga terhadap industri kretek di Indonesia," kata Djarot.

Berdasarkan survei, perokok akan berhenti merokok jika harganya lebih dari Rp50 ribu per bungkus. Harga itu naik sekitar 300% dari harga saat ini.

Dari survei itu juga diketahui bahwa 80,3% atau 976 responden mendukung kenaikan harga dan cukai rokok untuk membiayai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Survei terhadap 1.000 orang dilakukan Desember 2015 hingga Januari 2016. Survei dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang kenaikan harga maupun konsumsi rokok.

Diketahui 41,3% responden mengonsumsi rokok satu hingga dua bungkus per hari dengan biaya Rp450 ribu hingga Rp600 ribu per bulan. (MTVN/OL-3)

- See more at: <http://mediaindonesia.com/news/read/60878/wagub-dki-dukung-harga-rokok-dinaikkan/2016-08-10#sthash.jaE13vrZ.dpuf>



YLKI: Harga Rokok Mahal Justru Lindungi Konsumen dari Bahaya

Senin, 22 August 2016 22:48 WIB Penulis: **Antara**



ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan harga rokok yang mahal merupakan instrumen untuk melindungi konsumen dari dampak negatif yang ditimbulkan produk tembakau.

"Tembakau adalah barang yang dikenai cukai karena bukan barang normal yang justru seharusnya dihindari oleh masyarakat," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (22/8).

Ia mengatakan harga rokok yang mahal dan tarif cukai yang tinggi dimaksudkan agar masyarakat tidak semakin terperosok pada dampak merusak rokok baik secara individu, orang lain sebagai perokok pasif maupun lingkungan.

Karena itu, mengaitkan harga rokok yang dibuat mahal dengan daya beli masyarakat adalah suatu hal yang tidak tepat. Rokok dibuat mahal memang agar masyarakat tidak membelinya, terutama orang miskin dan anak-anak.

"Desakan agar harga rokok dinaikkan minimal Rp50 ribu per bungkus terus menguat. Kenaikan harga itu akan berdampak positif bagi masyarakat dan negara karena akan mengurangi jumlah perokok dan beban kesehatan yang harus ditanggung," tuturnya.

Menurut Tulus, mengaitkan dampak kenaikan harga rokok dan tarif cukai dengan nasib petani dan tenaga kerja juga tidak relevan. Ancaman petani dan pekerja bukan pada harga rokok yang tinggi.

Ancaman yang sebenarnya dihadapi petani tembakau lokal adalah tembakau impor. Selama ini, tembakau lokal tidak terserap pasar karena industri lebih banyak memilih tembakau impor.

Sedangkan ancaman utama buruh pabrik rokok adalah mekanisasi. Industri lebih memilih memproduksi rokok menggunakan mesin yang bisa menggantikan 900 orang buruh karena lebih efisien dan menguntungkan.

"Jadi ancaman petani dan buruh rokok itu bukan harga rokok dan kenaikan tarif cukai melainkan industri rokok sendiri," ujarnya. (OL-5)

- See more at: <http://mediaindonesia.com/news/read/62925/ylki-harga-rokok-mahal-justru-lindungi-konsumen-dari-bahaya/2016-08-22#sthash.NVSZQq3t.dpuf>



Kenaikan Harga Rokok untuk Selamatkan Generasi Muda

Sabtu, 27 August 2016 12:00 WIB Penulis: **Al Abrar/MTVN**



ANTARA

CENTER for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mendorong wacana kenaikan harga rokok berkisar Rp50 ribu segera ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu diyakini dapat menyelamatkan generasi muda.

"Kita ingin melindungi dan memastikan bahwa generasi muda itu jadi generasi dan populasi yang berkualitas. Jadi kalau memang ada kebijakan pemerintah kami dukung," kata Ketua Cisdia Diah Saminarsih, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8).

Diah juga meyakini menaikkan harga rokok dapat menekan rokok pemula. Namun, kata dia, harus dimbangi penengakan hukum. Sebab, pemerintah melalui undang-undang telah membatasi penjualan rokok di bawah usia 18+.

"Ini yang kita harapkan, jangan cuman sekadar menaikkan saja, tapi penengakan hukum dalam pembatasan penjualan rokok juga harus ditegakkan," ujar Diah.

Pihaknya mencatat, saat ini dengan murahnya harga rokok, generasi muda menjadi tergiur untuk membeli rokok. Saat ini pun jumlah perokok di generasi muda meningkat drastis sejak lima tahun terakhir.

"Ini sudah mengkhawatirkan, naik 5 kali dalam 5 tahun terakhir. Kami mendorong akan upaya nyata membantu pemerintah menjaga populasi tetap sehat dan berkualitas," ucapnya.

Seperti diketahui, wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp50 ribu/bungkus merupakan hasil survei dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Manusia Universitas Indonesia (UI). Dalam risetnya, sebanyak 46 persen perokok bakal berhenti merokok jika harganya dinaikkan sebesar 300 persen dari harga saat ini.

Dari survei juga diketahui bahwa 80,3 persen atau 976 responden mendukung kenaikan harga dan cukai rokok untuk membiayai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan diberikan karena anggaran JKN selalu defisit setiap tahun.



Wacana Kenaikkan Harga Rokok Jangan Jadi Kegaduhan Baru

Jum'at, 26 August 2016 07:58 WIB Penulis:



ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Herry Gunawan menilai wacana kenaikan harga rokok adalah isu kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan karena dapat membuat gaduh masyarakat Indonesia.

"Isu kenaikan harga rokok bermula dari hasil survei kecil-kecilan yang dibiayai asing dan untuk kepentingan asing, kemudian di-blow-up oleh beberapa orang di media sosial," kata Herry pada diskusi "Dialektika: Rokok, Pajak, dan Petani Tembakau" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (25/8).

Menurut Herry, setelah hasil survei itu di blow up di media sosial, kemudian menjadi ramai dan menimbulkan kegaduhan baru. Karena Pemerintah memberikan tanggapan serius sehingga masyarakat menduga harga rokok akan segera naik sehingga menimbulkan kegaduhan. "Padahal, isu ini hanya wacana dan belum ada kenaikan harga rokok," katanya.

Di sisi lain, Herry juga menduga, isu kenaikan harga rokok ini memang disengaja untuk melihat respons publik menyusul diberlakukannya UU Amnesti Pajak yang kurang mendapat respon dari para pengusaha dan pemilik dana.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun menambahkan harga rokok jika dinaikkan akan memiliki dampak negatif yang sangat luas, tidak hanya pada industri rokok tapi juga pada petani tembakau.

"Jika harga rokok dibiakkan, bagi para perokok akan mengurangi konsumsi rokok, misalnya semula satu bungkus per hari, menjadi setengah bungkus atau satu batang per hari," katanya.

Namun, bagi industri rokok resikonya dapat mengurangi produksi dan selanjutnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya, juga terjadi pada industri rokok berskala kecil atau industri rumahan.

Pada kesempatan tersebut, Misbakhun juga mengancam pengusul kenaikan harga rokok menjadi sekitar Rp50.000 per bungkus, yang didasarkan oleh hasil survei yang dibiayai asing dan untuk kepentingan asing.

"Dalam suatu dialog di televisi, diketahui pengusul itu menerima sejumlah uang dari asing. Ini sangat ironis, untuk kepentingan sendiri tapi akan menghancurkan industri rokok dan petani tembakau katanya.



Wacana kenaikan harga rokok perlu didukung

Selasa, 30 Agustus 2016 11:22 WIB | 7.519 Views

Pewarta: Abdul Fatah



Dokumentasi sejumlah remaja melakukan aksi kampanye bahaya merokok di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (29/5/2016). Aksi dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Dunia (World No Tobacco Day) tersebut menyerukan kepada masyarakat tentang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Ternate, Maluku Utara (ANTARA News) - Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (Fikes) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Nanti Supriatni, merespon keinginan Pemerintah untuk menaikkan harga rokok akan naik pada bulan Sempتمبر mendatang.

"Saya secara pribadi itu memandang mungkin ini salah satu cara pemerintah untuk mengurangi angka pengguna rokok itu sendiri dengan cara satu cara dengan menaikkan harga rokok, kalau misalkan dengan cara ini bisa menurunkan angka pengguna dan jumlah perokok di Indonesia itu didukung," katanya, di Ternate, Selasa.

Sebab, rokok itu merugikan pribadi baik menghisap maupun menerima asap rokok itu, karena ada perokok pasif dan aktif, kalau misalkan tidak dinaikkan harga rokok, maka secara otomatis, masyarakat kita rugi, apalagi yang pasif itu banyak.

"Intinya kalau untuk mempersiapkan generasi yang sehat di masa akan datang, harus seperti itu karena orang yang merokok sendiri mungkin memandang ini negatif, sebgaimana mereka yang perokok memandang ini adalah salah satu pandangan pemerintah mengalangi kebebasan merokok, cuma kasihan juga yang pasif.

Dia menyatakan, rokok ini akibatnya bukan saja pribadi, tetapi orang pasif ketika menghirup asar rokok bagi ibu hamil menyebabkan kecacatan bayinya, bagi orang tua menyebabkan jantung.

"Bagi perokok mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi kelihatanya di masa akan datang, ketika misalkan suami saya merokok karena setiap hari berdua kalau yang menghisap enak langsung dikeluarkan asapnya tetapi kita yang pasif menghisap asap rokok malah lebih para yang pasif," ujarnya.

